



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSMIYATI ALWY
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 63838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 865.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/150 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.000.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, CAYLA TOYOTA SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GT125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.380.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.136.526

F. HARTA LAINNYA Rp. 300.000.000

Sub Total Rp. 1.500.516.526



III. HUTANG

Rp. 432.681.625

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.067.834.901

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.